



TERBATAS
UNTUK DIGUNAKAN DALAM
LINGKUNGAN SENDIRI

KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(SMA)
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(GBPP)

MATA PELAJARAN : TATA NEGARA

PROGRAM STUDI : ILMU-ILMU SOSIAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SARANA PENDIDIKAN
JAKARTA, 1986



TERBATAS
UNTUK DIGUNAKAN DALAM
LINGKUNGAN SENDIRI

KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
(SMA)
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(GBPP)

MATA PELAJARAN : TATA NEGARA

PROGRAM STUDI : ILMU-ILMU SOSIAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SARANA PENDIDIKAN
JAKARTA, 1986

16.491/2017

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN GPBB	3
III. STRUKTUR PROGRAM	5
IV. GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN	9

I. PENDAHULUAN

1. GBPP Mata Pelajaran Tata Negara ini mencakup pengertian negara pada umumnya seperti yang diuraikan oleh asas-asas hukum tata negara dan pokok-pokok pengertian hukum seperti yang diuraikan oleh pengetahuan ilmu hukum secara singkat.

Berdasarkan pengertian-pengertian dasar tersebut dijelaskan mengenai bentuk negara dan pemerintahan seperti yang diatur oleh UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS beserta sedikit pelaksanaannya.

Kemudian disoroti juga secara selintas mengenai wilayah dan warga negara beserta hak-hak sosial politik dan sedikit tentang pemilihan umum sebagai soko guru Demokrasi Pancasila.

Akhirnya diuraikan juga lembaga-lembaga internasional dalam kaitannya dengan politik bebas aktif Negara Republik Indonesia.

2. Sistematika dari GBPP Tata Negara ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tata Negara Umum

- Pengertian ilmu negara dan tata negara beserta pengertian negara itu sendiri
- Unsur-unsur negara
- Teori-teori tujuan negara
- Bentuk negara dan bentuk pemerintahan

Hukum Umum

- Norma-norma hukum
- Pengertian hukum
- Tata hukum
- Tujuan dan sumber hukum

Tata Negara Indonesia

- Proklamasi dan UUD 1945
- Periode 1945 – 1949 (UUD '45)
- Periode 1949 – 1950 (Konstitusi RIS)
- Periode 1950 – 1959 (UUDS)
- Periode 1959 – 1966 (UUD 1945)

- Periode 1966 – (UUD 1945)
- Hubungan Indonesia dengan luar negeri beserta lembaga-lembaga internasional.

II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKSANAKAN GBPP MATA PELAJARAN TATA NEGARA

1. Dalam memilih metode, guru dapat memilih metode yang dicantumkan dalam kolom 8 asal sesuai dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai. Kecuali itu guru bisa juga mengkombinasikan dengan persyaratan yang sama. Bahkan, kalau situasi dan kondisinya menuntut guru bisa menggunakan metode lain yang sesuai.
2. Metode Widyawisata, kalau waktunya memungkinkan dapat diperbanyak terutama untuk mengetahui secara kongkrit aspek-aspek pemerintahan daerah. Kalau ada kesempatan widyawisata ke Jakarta, janganlah dilupakan bagi siswa-siswa yang mendapat pelajaran Tata Negara diajak mengunjungi lembaga-lembaga tinggi negara.
3. Mengenai buku sumber, kecuali buku paket guru dapat menggunakan buku-buku tata negara serta dokumen-dokumen tata negara seperti UUD, Ketetapan MPR, dan sebagainya yang tidak dilarang oleh Pemerintah.

III. STRUKTUR PROGRAM

STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 1984
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA)
PROGRAM STUDI: ILMU-ILMU SOSIAL

PROGRAM	MATA PELAJARAN	KELAS / SEMESTER						JUMLAH
		I		II		III		
		1	2	3	4	5	6	
PROGRAM INTI	1. Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	12
	2. Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
	3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa	2	—	2	—	2	—	6
	4. Bahasa dan Sastra Indonesia	4	4	3	3	2	2	18
	5. Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah Dunia	3	3	2	2	2	2	14
	6. E k o n o m i	3	3	—	—	—	—	6
	7. G e o g r a f i	—	—	2	2	3	3	10
	8. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan	2	2	2	2	—	—	8
	9. Pendidikan Seni	3	3	2	2	—	—	10
	10. Pendidikan Keterampilan	2	4	2	2	—	—	10
	11. M a t e m a t i k a	4	4	—	—	—	—	8
	12. B i o l o g i	3	3	—	—	—	—	6
	13. F i s i k a	2	2	—	—	—	—	4
	14. K i m i a	2	2	—	—	—	—	4
	15. Bahasa Inggris	3	3	—	—	—	—	6
		Jumlah	37	37	19	17	13	11
PROGRAM PILIHAN	16. E k o n o m i	—	—	5	5	5	5	20
	17. Sosiologi dan Antropologi	—	—	3	3	3	3	12
	18. Tata Negara	—	—	2	2	3	3	10
	19. Matematika	—	—	3	4	4	3	14
	20. Bahasa Inggris	—	—	3	5	5	6	20
	21. Bahasa Asing Lain	—	—	3	2	4	3	12
	Jumlah	—	—	19	21	28	23	88
	JUMLAH BEBAN BELAJAR	37	37	38	38	38	34	222

IV. GARIS – GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

MATA PELAJARAN : TATA NEGARA

SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA)

PROGRAM STUDI : ILMU-ILMU SOSIAL

KELAS : II

TUJUAN KURIKULER	TUJUAN INSTRUKSIONAL	BAHAN PENGAJARAN		PROGRAM			METODE	SARANA/SUMBER	PENILAIAN	KETERANGAN
		POKOK BAHASAN	URAIAN	KE-LAS	SEM	JAM PEL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Siswa memahami dasar-dasar umum ketatanegaraan, dasar-dasar kenegaraan Negara Republik Indonesia serta lembaga-lembaga internasional dan perjanjian hubungan internasional.	1. Siswa memahami dasar-dasar umum ketatanegaraan, pengertian dan asal mula negara, melalui penafsiran.	<p>1.1 Negara</p> <p>1.1.1. Pengertian Ilmu Negara dan Ilmu Tata Negara</p> <p>1.1.2. Pengertian Negara</p> <p>1.1.3 Asal Mula Terjadinya Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asal usul, ujud, perkembangan, lenyapnya, dan jenis-jenis negara secara umum (Ilmu Negara). - Susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Negara, misalnya tentang Indonesia dan negara lainnya (Ilmu Tata Negara). <p>* Membaca uraian serta membandingkan dan menyimpulkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara sebagai organisasi kekuasaan - Negara sebagai organisasi politik - Negara ditinjau dari segi organisasi kekuasaan - Negara ditinjau dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat. <p>* Membaca uraian tentang negara dari berbagai segi, membandingkan, dan menyimpulkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asal mula terjadinya negara baik berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada ataupun berdasarkan teori-teori terjadinya negara, misalnya berdasarkan teori Ketuhanan, teori Perjanjian, teori Kekuasaan, dan teori Kedaulatan. <p>* Membaca uraian tentang asal mula terjadinya negara serta membandingkan teori-teori yang membahas tentang terjadinya negara tersebut.</p>	II	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah dan tanya jawab - Diskusi - Penugasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket dan buku lain yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian. - Tes tertulis berbentuk obyektif. - Laporan. 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2. Siswa memahami unsur-unsur negara, melalui pengamatan dan penafsiran.	2.1 Unsur-unsur Terbentuknya Negara 2.1.1. Daerah 2.1.2 Rakyat 2.1.3 Pemerintahan yang berdaulat 2.1.4 Pengakuan oleh Negara-negara Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah suatu negara meliputi daratan, lautan, serta udara di atasnya. * Membaca sumber, mencari dari sumber lingkungan, dan menyimpulkannya. - Kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan bertekad untuk hidup bersama dalam suatu kesatuan politik, yang akhirnya terbentuk menjadi satu bangsa. * Membaca uraian tentang terbentuknya suatu bangsa, mendiskusikan, dan menyimpulkannya. - Suatu pemerintahan yang mempunyai kedaulatan ke dalam dan ke luar. * Membaca sumber serta membandingkan dan menarik kesimpulan tentang kedaulatan. - Pengakuan dari negara lain, baik yang bersifat <i>de facto</i> maupun <i>de jure</i>. * Membaca sumber serta mendiskusikan dan menarik kesimpulan tentang pengakuan suatu negara. 	II	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan - Diskusi 	- Buku paket dan buku lain yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian - Laporan - Tugas 	
	3. Siswa memahami teori-teori tujuan negara, melalui penafsiran dan komunikasi	3.1. Teori-teori Tujuan Negara 3.1.1. Kekuasaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuasaan penuh pemerintah terhadap rakyat. * Membaca sumber, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan. 	II	3	9	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah dan tanya jawab - Diskusi - Penugasan 	- Buku paket dan buku lain yang relevan	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian - Tes tertulis berbentuk obyektif - Laporan - Tugas 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<p>4. Siswa memahami bentuk negara dan bentuk pemerintahan negara, melalui pengamatan dan penafsiran.</p>	<p>3.1.2 Perdamaian Dunia</p> <p>3.1.3. Jaminan atas Hak dan Kebebasan</p> <p>4.1 Bentuk Negara, Pemerintahan, dan Demokrasi</p> <p>4.1.1. Bentuk Negara</p> <p>4.1.2. Bentuk Pemerintahan</p> <p>4.1.3. Bentuk Demokrasi</p>	<p>– Perdamaian dunia merupakan tujuan semua bangsa.</p> <p>* Membaca sumber, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan.</p> <p>– Kedudukan individu dan masyarakat dalam negara.</p> <p>* Membaca sumber, membandingkan, mendiskusikan, dan menyimpulkan.</p> <p>– Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.</p> <p>– Negara gabungan dengan sistem federasi dan persemakmuran.</p> <p>* Membaca sumber, membandingkan, dan menarik kesimpulan tentang bentuk negara.</p> <p>– Bentuk pemerintahan yang kepala negaranya diangkat berdasarkan waris atau keturunan, dan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat secara bebas untuk masa jabatan tertentu.</p> <p>* Membaca sumber, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan tentang bentuk-bentuk pemerintahan.</p> <p>– Demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan sistem referendum.</p> <p>* Membaca sumber, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan tentang bentuk-bentuk demokrasi modern.</p>	II	3	9	<p>36</p> <p>– Diskusi</p> <p>– Penugasan</p>	<p>– Buku paket dan buku lain yang relevan</p>	<p>– Tes tertulis berbentuk uraian</p> <p>– Tes tertulis berbentuk obyektif</p> <p>– Laporan</p> <p>– Tugas</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<p>5. Siswa memahami dan menyadari arti pentingnya norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu atau secara internasional, melalui penerapan konsep-konsep norma-norma hukum yang berlaku.</p>	<p>5.1. Norma-norma Hukum</p> <p>5.1.1 Peraturan Pergaulan Hidup dalam Negara</p> <p>5.1.2. Tata Hukum</p> <p>5.1.3. Tujuan Hukum dan Sumber-sumber Hukum</p> <p>5.1.4. Hukum Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan warga negara dengan warga negara. * Membaca sumber, mendiskusikan, serta mencari contoh-contoh pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. - Pengaturan pergaulan hidup diwujudkan dalam suatu Tata Hukum Negara yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Hukum Publik (Material dan Formal) mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Tata Negara - Administrasi Negara; Pidana. - Hukum Perdata (Material dan Formal) mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - orang - benda - hubungan * Membaca sumber, mendiskusikan, dan mencari contoh penerapan hukum perdata dan pidana. - Hukum menciptakan keadamaian yakni keserasian antara ketertiban dan ketenteraman. - Sumber-sumber hukum meliputi kebiasaan, perjanjian, doktrin dekrit, yurisprudensi, dan konstitusi. * Membaca sumber, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan. - Aturan-aturan yang mengatur hubungan antarnegara. * Membaca, mendiskusikan, mencari contoh-contoh pelaksanaan hukum internasional, dan menarik kesimpulan. 	II	4	8	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah dan tanya jawab - Diskusi - Penugasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket dan buku lain yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes terli - Tes tertulis berbentuk uraian - Tes tertulis berbentuk obyektif - Laporan - Tugas 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<p>6. Siswa memahami latar belakang lahirnya ketatanegaraan Indonesia, melalui pengamatan dan penafsiran.</p>	<p>6.1. Latar Belakang Lahirnya Negara Republik Indonesia</p> <p>6.1.1 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945</p> <p>6.1.2 Pembukaan UUD 1945</p>	<p>- Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan "norma pertama" dari Tata Hukum Indonesia dan merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.</p> <p>- Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari tertib hukum Indonesia dan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental.</p> <p>* Mengumpulkan berbagai informasi, mendiskusikan, serta menyimpulkan tentang latar belakang lahirnya ketatanegaraan Indonesia.</p>	II	4	8	<p>- Penugasan - Diskusi</p>	<p>- Buku paket dan buku lain yang relevan</p>	<p>- Tes tertulis berbentuk uraian - Tes tertulis berbentuk obyektif - Laporan - Tugas</p>	
	<p>7. Siswa memahami lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara menurut UUD 1945, melalui pengamatan dan penafsiran</p>	<p>7.1. Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945</p> <p>7.1.1. Lembaga tertinggi Negara</p> <p>7.1.2 Lembaga-lembaga Tinggi Negara</p> <p>7.1.3 Lembaga Negara Nondepartemental.</p>	<p>- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan perwujudan kedaulatan tertinggi rakyat berdasarkan musyawarah.</p> <p>- Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), Dewan Pertimbangan Agung (DPA).</p> <p>- Kejaksaan Agung, BAPPENAS, LIPI.</p> <p>* Membuat bagan tentang lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta saling hubungannya. Membaca sumber, mendiskusikan, serta menyimpulkan fungsi, tugas, dan hubungan tata kerja lembaga-lembaga kenegaraan, mencatat berita tentang Lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara.</p>	II	4	8	<p>- Penugasan - Diskusi</p>	<p>- Buku paket - UUD 1945 - TAP MPR yang relevan - Buku lain yang relevan</p>	<p>- Tes tertulis berbentuk uraian - Tes lisan - Laporan - Tugas</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	8. Siswa memahami lembaga pemerintahan menurut UUD 1945, melalui perencanaan penelitian dan pengamatan.	<p>8.1 Lembaga Pemerintah</p> <p>8.1.1. Pemerintah Pusat</p> <p>8.1.2. Pemerintah Daerah</p> <p>8.1.3 Asas-asas Pemerintahan</p>	<p>- Penyelenggaraan pemerintah tertinggi di negara Republik Indonesia dilakukan oleh perangkat pemerintahan pusat: Presiden dengan para pembantunya (Menteri-menteri).</p> <p>- Pasal 18 UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah diatur oleh Perundang-undangan (UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979).</p> <p>- Asas-asas pemerintahan daerah: sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind.</p> <p>* Membaca sumber, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang lembaga-lembaga pemerintahan serta berwidyawisata ke DPRD Tingkat II.</p>	II	4	8 32	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan - Tanya jawab - Widyawisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket - UUD 1945 - UU No.5/1974 - UU No.5/1979 - Buku lain yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian - Tes tertulis berbentuk obyektif - Laporan - Tugas 	

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

MATA PELAJARAN : TATA NEGARA

SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA)

PROGRAM STUDI : ILMU-ILMU SOSIAL

KELAS : III

TUJUAN KURIKULER	TUJUAN INSTRUKSIONAL	BAHAN PENGAJARAN		PROGRAM			METODE	SARANA/SUMBER	PENILAIAN	KETERANGAN
		POKOK BAHASAN	URAIAN	KE-LAS	SEM	JAM PEL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Siswa memahami dasar-dasar umum ketatanegaraan, dasar-dasar kenegaraan Negara Republik Indonesia serta lembaga-lembaga internasional dan perjanjian hubungan internasional.	1. Siswa memahami dinamika ketatanegaraan Indonesia melalui pengamatan dan komunikasi.	1.1 Dinamika Ketatanegaraan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan menurut: <ul style="list-style-type: none"> a. UUD 1945 (18-8-1945) <ul style="list-style-type: none"> - Kesatuan - Republik - Presidentil (18-8-1945 s.d. 14-11-1945) - Parlementer (14-11-1945 s.d. 27-12-1949) b. Konstitusi RIS (1949-1950) <ul style="list-style-type: none"> - Serikat - Republik - Parlementer c. UUDS 1950 (17-8-1950 s.d. 5 Juli 1959) <ul style="list-style-type: none"> - Kesatuan - Republik - Parlementer (Liberal) d. Dekrit Presiden (5-7-1959) UUD 1945 <ul style="list-style-type: none"> - Kesatuan - Republik - Presidentil (Terpimpin) - Periode 11-3-1966 s.d. sekarang - Kesatuan - Republik - Presidentil (Pancasila) e. Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia. 	III	5	22	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah dan tanya jawab - Diskusi - Penugasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket - UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS - Bahan pelengkap P4 - Bagan struktur organisasi Pemerintahan Presidentil dan Parlementer sesuai dengan materi. - Buku lain yang relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian. - Tes tertulis berbentuk obyektif. - Laporan - Tugas. 	

* Membaca sumber, membuat laporan, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2. Siswa memahami hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, melalui pengamatan dan penerapan konsep tentang hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945	<p>2.1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia Menurut UUD 1945</p> <p>2.1.1. Negara Hukum</p> <p>2.1.2. Penduduk Indonesia</p> <p>2.1.3. Warga Negara Indonesia</p> <p>2.1.4. Hak dan Kewajiban Warga Negara</p>	<p>- Hukum dijunjung tinggi dan mempunyai tempat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat/negara Republik Indonesia. Perangkat dan aparat negara, warga negara dan semua orang yang berada dalam lingkungan negara Republik Indonesia tunduk pada hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia.</p> <p>- Semua orang di dalam wilayah negara yang berada selama jangka waktu tertentu adalah penduduk negara Republik Indonesia.</p> <p>- Semua orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai anggota (warga) negara Indonesia.</p> <p>- Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>* Membaca sumber, melakukan observasi lapangan, membuat laporan, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan.</p>	III	5	22	<p>- Ceramah dan tanya jawab</p> <p>- Diskusi</p> <p>- Penugasan</p>	<p>- UU yang relevan</p> <p>- Buku lain yang relevan</p>	<p>- Tes tertulis berbentuk uraian.</p> <p>- Tes tertulis berbentuk obyektif.</p> <p>- Laporan</p> <p>- Tugas</p>	
	3. Siswa memahami pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia, melalui pengamatan	3.1. Pemilihan Umum (Pemilu)	<p>- Pemilihan umum sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila.</p> <p>- Undang-undang Pemilihan Umum</p> <p>- Pelaksanaan Pemilihan Umum</p> <p>- Susunan dan kedudukan anggota</p> <p>* Membaca buku sumber, membuat laporan, mendiskusikan, dan menyimpulkan.</p>	III	5	10 54	<p>- Diskusi</p> <p>- Penugasan</p>	<p>- Buku paket</p> <p>- UU Pemilu</p> <p>- Buku lain yang relevan</p>	<p>- Tes tertulis berbentuk uraian.</p> <p>- Tes lisan</p> <p>- Laporan</p> <p>- Tugas</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	4. Siswa memahami tentang organisasi/lembaga-lembaga internasional melalui pengamatan, mengklasifikasikan dan mengkomunikasikan.	4.1. Organisasi dan Lembaga Internasional 4.1.1 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 4.1.2 Organisasi/Lembaga Internasional Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah, tujuan, struktur, dan peranan organisasi, lembaga internasional PBB - Organisasi/lembaga internasional lain di luar PBB antara lain: ASEAN, MEE, OPEC, NATO, PAKTA WARSAWA, LIGA ARAB, ORGANISASI NEGARA-NEGARA NON BLOK. * Membaca buku sumber, koran, dan majalah, menulis laporan, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan. 	III	6	4	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah dan tanya jawab - Diskusi - Simulasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket buku lain yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian. - Tes lisan - Laporan - Tugas 	
	5. Siswa memahami tentang perjanjian / hubungan internasional, serta politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, melalui pengamatan dan komunikasi	5.1. Perjanjian Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian yang menyangkut suatu negara dengan suatu negara lain, dan perjanjian yang menyangkut lebih dari satu negara (perjanjian bilateral dan multilateral). * Membaca buku sumber, koran, dan majalah serta mendiskusikan dan menarik kesimpulan. 	III	6	8	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan - Tanya jawab - Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket dan buku lain yang relevan - Koran dan Majalah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes lisan - Laporan - Tugas 	
	6. Siswa memahami politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, melalui penafsiran	6.1. Politik Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif	<ul style="list-style-type: none"> - Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. - Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta memelihara perdamaian dunia yang abadi. * Membaca buku sumber, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan. 	III	6	8	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah dan tanya jawab - Diskusi - Penugasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket dan buku lain yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes tertulis berbentuk uraian. - Tes lisan - Laporan - Tugas 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<p>7. Siswa memahami hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia melalui pengamatan.</p>	<p>7.1. Hubungan Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Departemen Luar Negeri dan peranannya. - Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) dalam membina hubungan dengan negara lain dalam arti politis, dan perangkat korps diplomatik: Duta Besar, Kuasa Usaha, dan Atase-atase. - Peranan perwakilan Republik Indonesia dalam arti non politis, dan perangkat korps konsuler: Konsul Jenderal, Konsul dan Wakil Konsul. <p>* Membaca buku sumber, mendiskusikan dan menyimpulkan tentang perjanjian/hubungan internasional.</p>	III	6	8	<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan - Diskusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku paket dan buku lain yang relevan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes lisan - Laporan - Tugas 	

